

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLA PANGAN HARAPAN (PPH) DI KABUPATEN BANDUNG

FACTORS AFFECTING HOPE FOOD PATTERN (PPH) IN BANDUNG DISTRICT

SYAEFUL ARGANDI*¹, LUCYANA TRIMO², TRISNA INSAN NOOR²

Program Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

*Email: syaefulargandi@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu cara mengetahui kemandirian pangan melalui kualitas keragaman konsumsi pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Skor PPH maksimal, yaitu 100 menunjukkan situasi konsumsi pangan yang beragam dan baik komposisi serta mutu gizinya (Baliwati, 2011). Pada prakteknya capaian indikator kualitas dan kuantitas pangan di Kabupaten Bandung belum tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan terhadap PPH di Kabupaten Bandung. Metode dasar penelitian ini adalah metode eksplanasi (*Eksplanatory Research*). Penentuan Kecamatan Paseh dan Pasirjambu dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu ditentukan kecamatan tertinggi dan terendah PPHnya. Selanjutnya ukuran responden dengan menggunakan teknik Slovin. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PPH di Kabupaten Bandung menggunakan teknik analisis regresi berganda dan pengujiannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran keluarga, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap PPH Kabupaten Bandung. Artinya semakin tinggi besaran keluarga, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula PPH di Kabupaten Bandung.

Kata kunci: besaran keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, Pola Pangan Harapan

ABSTRACT

One way to know food self-sufficiency through the quality of food consumption diversity as measured by Food Harvest Scale (PPH) scores, hereinafter abbreviated as PPH. PPH can be used as a measure of nutritional balance and food diversity consumed by residents in a region. The maximum PPH score, 100 indicates the diverse food consumption situation and both the composition and quality of nutrition (Baliwati, 2011). In practice, the achievement of food quality and quantity indicator in Bandung Regency has not been achieved. This study aims to determine the size of family, education level, and income level of PPH in Bandung regency. The basic method of this research is the explanatory method (Eksplanatory Research). The determination of Paseh and Pasirjambu sub-districts was conducted by purposive sampling, which is determined by the highest and lowest kecamatan PPH. Furthermore the size of respondents using Slovin techniques. To know the factors that influence the PPH in Bandung regency using multiple regression analysis technique and the test is done by using SPSS 20 program. The result of the research shows that the family size, education level and income level have positive influence on PPH Kabupaten Bandung. This means that the higher the size of the family, the level of education and income level then the higher the PPH in Bandung regency.

Keywords: family size, education level, income level, Food Pattern of Hope (PPH)

PENDAHULUAN

Jawa Barat berdasarkan pertimbangannya bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui

ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kemandirian Pangan Daerah. Perda

Provinsi Jawa Barat menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kemandirian Pangan Daerah No 4 Tahun 2012. Perda mengikat individu maupun lembaga yang berada dalam ruang lingkup kebijakan tersebut agar dicapai pemecahan masalah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Kebijakan sebagai tata kelola dan wujud intervensi terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di Jawa Barat.

Implikasi dari adanya Perda Provinsi Jawa Barat tentang Kemandirian Pangan adalah keharusan mendorong kemandirian pangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat termasuk Kabupaten Bandung. Perda Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah; dan pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah termasuk bagi Kabupaten Bandung.

Konsumsi pangan merupakan output pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah. Oleh karena itu, penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan isu penting yang harus ditingkatkan upaya pencapaiannya. Azadbakht dkk (2005) menegaskan bahwa variasi makanan akan menentukan tingkat kualitas kecukupan gizi. Variasi makanan

merupakan konsep penting dalam promosi kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kuantitas konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Energi (AKE).

Kabupaten Bandung sebagai daerah otonom memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan urusan ketahanan pangan, salah satunya yaitu upaya pencapaian PPH sesuai dengan harapan. Tingkat konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2014 masih berada di bawah standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan. Berdasarkan data Susenas Tahun 2011 yang diolah, penduduk Kabupaten Bandung baru mengonsumsi energi sebesar 98.5% dari AKE atau setara dengan 2.070 kkal/kapita/hari. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.75 tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan adalah 2150 kkal/kapita/hari dan 57 gram. Mengacu pada ketentuan maka angka 98.5% dinilai masih kurang seperti dinyatakan dalam data Kementerian Kesehatan RI tahun 2016 kategori Kurang: adalah $70 \leq 100\%$ AKE. Proporsi asupan masih bersumber pada karbohidrat sebesar 58%. Keragaman asupan pangan masih rendah di Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya untuk mengoptimalkan upaya menuju kemandirian pangan. Kebijakan ditujukan untuk mengatasi masalah seperti lemahnya peningkatan dan pengembangan

kinerja organisasi, pengembangan ketahanan pangan yang terhambat alih fungsi lahan, harga maupun teknologi pertanian, serta belum optimalnya penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Kebijakan Kabupaten Bandung pada tahun 2016 adalah Pengembangan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, Peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi. Fokus utama kebijakan adalah pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah di samping peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas unggulan. Langkah strategis, yang ditempuh antara lain meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

Permasalahan dalam PPH di Kabupaten Bandung pada tahun 2016 antara lain: 1) Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah; 2) Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu pun masih rendah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap PPH antara lain tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,

besaran keluarga, budaya, atau gaya hidup terutama masyarakat yang berada di daerah perkotaan atau pinggiran kota (Retnaningsih, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah jenis, jumlah produksi, dan ketersediaan pangan (Harper *et al.* 1988). Selain itu, konsumsi pangan penduduk juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, pendidikan, gaya hidup, pengetahuan, aksesibilitas, dan sebagainya. Bahkan, faktor *prestise* dari pangan kadang kala menjadi sangat menonjol sebagai faktor penentu daya terima pangan (Martianto dan Ariani, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Duram dan Oberholtzer (2010) bahwa letak geografis termasuk perubahan cuaca mempengaruhi pangan seperti disampaikan bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara perubahan iklim dan pertanian. Lutz dan Schachinger (2013) mengemukakan bahwa tata kelola makanan secara lokal merupakan aspek penting dalam pengelolaan pangan. Jaringan makanan lokal yang inovatif berfungsi untuk menginduksi perubahan sosio-ekologis di tingkat lokal dan mendorong transformasi yang lebih luas tentang pangan. Persoalan inovasi jaringan dalam tata kelola pangan di tingkat lokal masih menjadi masalah seperti di Kabupaten Bandung.

Bastian dan Coveney (2011) dalam penelitiannya tentang kebijakan pemerintah

lokal dalam mengembangkan ketahanan pangan menjelaskan bahwa pengetahuan lokal memiliki peran penting untuk mendorong efektivitas dalam kebijakan pangan. Ditegaskan mengenai fungsi kebijakan dalam pangan adalah: “ (i) *policy to create supportive environments*; (ii) *policy to strengthen community action*; (iii) *policy to support individual food security*; and (iv) *policy to improve coordination and capacity for food security*”. Lang dan Barling (2013) mengemukakan isu nutrisi dan sustainability dalam makanan menjadi isu penting guna menghasilkan kebijakan yang dapat memecahkan masalah-masalah pangan.

Penelitian tentang PPH terbatas pada aspek-aspek kebijakan, distribusi, penyediaan pangan atau membahas mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi secara parsial. Penelitian yang menelaah tentang bagaimana PPH secara menyeluruh baik di level kebijakan, maupun di level konsumen masih terbatas. Telaah menyeluruh akan menghasilkan sudut pandang yang lebih luas tentang pokok persoalan belum tercapainya PPH. Realitas mengenai persoalan belum terpenuhinya PPH merupakan fenomena masalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan wilayah dan pada akhirnya terkait dengan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu penelitian menyeluruh perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan memperbaiki masalah yang berkaitan dengan kurangnya PPH di Kabupaten Bandung baik internal maupun eksternal. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk rekomendasi perencanaan konsumsi pangan penduduk yang berujung pada perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung. Desain yang digunakan untuk penelitian ini adalah desain kuantitatif, dan teknik penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi (*Eksplanatory Research*) yaitu apabila peneliti menjelaskan hubungan atau pengaruh kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis maka dinamakan penelitian penjelasan (Singarimbun, 2003).

Data primer diperoleh dengan melakukan survey langsung di lapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya memilih kecamatan yang memiliki PPH tertinggi dan terendah (Sugiyono, 2012). Responden yang dipilih berjumlah 100 Kepala Keluarga (KK) yang dihitung ukurannya berdasarkan teknik Slovin. Hal itu

dilakukan untuk membantu penulis dalam menggambarkan besaran keluarga, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan dan pola pangan harapan.

Selanjutnya, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi PPH Kabupaten Bandung maka dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresiberganda, pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji analisis berganda pengaruh besaran keluarga, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan terhadap PPH maka dapat dihasilkan uji regresi berganda pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.44	.14		-3.09	.003
Besaran Keluarga	.32	.07	.270	4.15	.000
Tingkat Pendidikan	.06	.07	.598	8.75	.000
Tingkat Pendapatan	.35	.13	.166	2.53	.013

a. Dependent Variable: Pola Pangan Harapan

Pengaruh Besaran Keluarga (X_1) PPH

Hasil olah data menunjukkan bahwa besaran keluarga berpengaruh positif terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Hasil olah data tersebut berdasarkan nilai signifikan besaran keluarga sebesar $0,00 < 0,05$ yang artinya besaran keluarga berpengaruh positif terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan

Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Hal tersebut sesuai dengan nilai t hitung sebesar 4,15. Nilai tersebut harus lebih besar dari t Tabel, dimana distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ dengan dk $(100-3-1) = 96$, maka diperoleh t Tabel sebesar 1,98. Oleh karena nilai t hitung $>$ t Tabel $(4,15 > 1,98)$ maka H_0 ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara besaran keluarga berpengaruh terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia no.21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada pasal 6 yang dikutip oleh Retno Puji Rahayu (2006), menyebutkan bahwa dalam mencapai suatu peningkatan status gizi keluarga salah satunya dapat dilakukan dengan pengembangan kualitas keluarga melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB) yang mengatur tentang jarak jumlah anggota keluarga.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori Soetjingsih (1995) bahwa dengan keluarga kecil secara ekonomi lebih menguntungkan sehingga diharapkan kesejahteraan keluarga lebih terjamin dan kebutuhan akan pangan juga akan lebih terpenuhi daripada keluarga dengan jumlah yang besar. Kesejahteraan ini dapat dilihat dari semakin idealnya skor PPH. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan sebab-sebab seperti

adanya pembagian atau distribusi makanan yang tidak merata pada anggota keluarga sehingga mempengaruhi konsumsi makanan, status gizi, dan skor PPH keluarga.

PPH mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Berdasarkan skor pangan dari sembilan bahan pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan ditingkat rumah tangga. Selanjutnya pola konsumsi pangan rumah tangga akan berpengaruh pada konsumsi pangan (Depkes RI, 2005). Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga komposisi pangan masyarakat sesuai dengan anjuran hidup sehat dan produktif. Sehingga dengan mengupayakan PPH yang baik diharapkan dapat terwujud ketahanan pangan di Indonesia. Dalam aplikasinya PPH dikenal dengan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau dikenal dengan istilah menu B2SA. Dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai dengan PPH maka secara implisit kebutuhan zat gizi lainnya juga terpenuhi. Oleh karena itu skor PPH mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan.

Maka jelaslah penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh besaran

keluarga terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, jadi semakin tinggi besaran keluarga, semakin baik pula PPH Keluarga pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, begitu pula sebaliknya semakin rendah besaran keluarga maka PPH Keluarga pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung juga akan rendah.

Pengaruh Tingkat Pendidikan (X_2) Terhadap PPH

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung berpengaruh positif. Hasil analisis tersebut berdasarkan nilai signifikan tingkat pendidikan sebesar $0,002 < 0,05$ yang artinya tingkat pendidikan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung berpengaruh positif. Hal tersebut sesuai dengan nilai t hitung sebesar 8,75. Nilai tersebut harus lebih besar dari t Tabel, dimana distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ dengan dk $(100-3-1) = 96$, maka diperoleh t Tabel sebesar 1,98. Oleh karena nilai t Hitung $> t$ Tabel ($8,75 > 1,98$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat

pendidikan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

Hasil ini sejalan dengan teori Soegeng Santoso (1999), bahwa tingkat pendidikan memungkinkan seseorang memilih dan mempertahankan pola makan berdasarkan prinsip ilmu sehingga skor PPH juga baik. Perlu ditambahkan bahwa harus diperhatikan aplikasi praktis atau pelaksanaan dengan pengertian makanan yang kuat gizi, biaya bahan makanan dan pengolahan serta sikap, kepercayaan, faktor kebudayaan dan emosi yang ada pada seseorang berkaitan dengan makanan. Semakin banyak pengetahuan semakin diperhitungkan jenis dan kuantum makanan yang dipilih untuk dikonsumsinya. Awam yang tidak mempunyai cukup pengetahuan gizi akan memilih makanan yang paling menarik panca indera dan tidak mengadakan pilihan berdasarkan nilai gizi makanan. Sebaliknya mereka yang semakin banyak pengetahuan gizi lebih banyak menggunakan pertimbangan rasional dan pengetahuan tentang nilai gizi makanan tersebut. Jika pengetahuan baik, status gizi keluarga akan meningkat karena pola konsumsi dan keragaman pangan sudah terpenuhi (Achmad Djaeni S, 2000).

Maka jelaslah penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap PPH pada Kecamatan

Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, jadi semakin tinggi tingkat pendidikan pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, semakin baik pula PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung juga akan rendah.

Pengaruh Tingkat Pendapatan (X₃) Terhadap PPH

Hasil penelitian berdasarkan nilai signifikan sebesar $0,013 < 0,05$ yang artinya tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Hal tersebut sesuai dengan nilai t hitung sebesar 2,53. Nilai tersebut harus lebih besar dari t Tabel, dimana distribusi t dicari pada $\alpha = 5\%$ dengan $dk (100-3-1) = 96$, maka diperoleh t Tabel sebesar 1,98. Oleh karena nilai t hitung $> t$ Tabel ($2,53 > 1,98$) maka H_0 ditolak, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang dari pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Pendapatan umumnya diterima dalam

bentuk uang. Pendapatan adalah sumber daya material yang sangat penting bagi masyarakat, karena dengan pendapatan itulah seseorang bisa membiayai konsumsinya. Jumlah pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli dari seseorang. Daya beli akan menggambarkan banyaknya produk dan jasa yang bisa dibeli dan dikonsumsi oleh seseorang dan seluruh anggota keluarganya.

Pendapatan dan penerimaan menurut Biro Pusat Statistik dibedakan sebagai berikut 1)Pendapatan faktor yang didistribusikan, yang dibagi lagi menurut sumbernya menjadi: a)Penghasilan gaji dan upah; b)Penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas; c)Penghasilan dari pemilikan harta; 2)Transfer yang bersifat redistributif, terutama terjadi dari transfer pendapatan yang tidak mengikat dan biasanya bukan merupakan imbalan atas penyerahan barang, jasa atau harta milik.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendapatan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan keluarga dengan tingkat pendapatan rendah memiliki skor PPH kurang sebanyak 26 keluarga (76,4%) dan dengan skor PPH tinggi sebanyak 8 keluarga (23,5%). Keluarga yang tingkat pendapatan tinggi dengan skor PPH kurang sebanyak 23 (34,8%) dan dengan skor PPH tinggi

sebanyak 43 (65,1%). Hal ini dapat terjadi karena pada suatu keluarga tidak semua dari pendapatan yang diperoleh di pakai untuk konsumsi makanan, contohnya pada keluarga yang melebihi anggaran untuk pendidikan anak-anaknya daripada untuk makanan yang dikonsumsi sehingga status gizi anggota keluarga menjadi kurang.

Berbagai upaya perbaikan gizi biasanya berorientasi pada tingkat pendapatan keluarga. Semakin meningkatnya pendapatan, maka kecukupan makanan dapat terpenuhi. Dengan demikian tingkat pendapatan keluarga memiliki faktor utama dalam pemilihan bahan makanan yang berkualitas. Besar kecilnya pendapatan rumah tangga juga tidak lepas dari pekerjaan dari orang tua serta tingkat pendidikan (Soekirman, 1991). Dengan demikian jika tingkat pendapatan perkapitanya tinggi maka skor PPH tentu akan tinggi, ini sesuai dengan pendapat dari Djiteng Roedjito (1989), bahwa besar kecilnya pendapatan keluarga berpengaruh terhadap pola konsumsi dan status gizi individu, maka apabila suatu keluarga berpenghasilan tinggi maka mereka mampu membeli pangan bergizi. Selain itu, Tingkat pendapatan keluarga dapat digunakan untuk dua tujuan yaitu konsumsi dan tabungan. Besar kecilnya pendapatan yang diterima seseorang akan mempengaruhi pola konsumsi.

Maka jelaslah penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendapatan terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, jadi semakin tinggi tingkat pendapatan pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, semakin baik pula PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan maka PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan besaran keluarga, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Artinya jika porsi besaran keluarga, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan meningkat maka PPH pada Kecamatan Paseh dan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung juga akan meningkat.

Keterbatasan pendapatan rumah tangga merupakan salah satu penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan rumah tangga.

Selain itu, guna meningkatkan PPH di Kabupaten Bandung tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung harus diperhatikan agar pengetahuan masyarakat di daerah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan tentang pentingnya pangan bagi kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Analia, Dewi. 2009. Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah tangga di Sumatera Barat Menuju Pola Pangan Harapan. Program Pascasarjana Universitas Andalas
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2011. Direktori Pengembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan.
- Baliwati, Yayuk Farida. 2007. Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan. Kerjasama Bagian Bina Ketahanan Pangan Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Barat dengan Tim Bagian Kebijakan Pangan Departemen gizi Masyarakat FEMA IPB, Bogor.
- Baliwati, Yayuk Farida. 2011. Materi Pelatihan Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan Wilayah Berdasarkan Ketersediaan Pangan Wilayah. Diperbanyak oleh MWA Consultant, Bogor
- Bastian.,A dan Coveney.,J (2011) Local evidenced-based policy options to improve foodsecurity in South Australia: the use of local knowledgein policy development. Public Health Nutrition: 15(8), 1497–1502
- Basuki, H (2006). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan Dan Budaya*. Jakarta

- Caraher M., dan Coveney.,J (2004) Public health nutrition and food policy. *Public Health Nutrition*: 7(5), 591–59
- Chamberlain.,K (2004) Food and Health:Expanding the Agendafor Health Psychology. *JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY* 9(4) 471-781
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategis Edisi 10*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Departemen Kesehatan. 1996. *Panduan 13 Pesan Dasar Gizi Seimbang*. Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2005-2009*. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2011. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014*. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.
- Firman Noer TA. 2002. *Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Kawasan Sentra Produksi Koto Hilalang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat*. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana IPB
- Frankenberger, TR. 1992. *Indicators and Data Collection Methods for Assessing Household Food Security* di dalam: *Maxwell S, Frankenberger TR. Household Food Security: Concepts, Indocators, Measurements, A Technical Review. UNICEF-IFAD*
- Hardinsyah dan Drajat Martianto. 1992. *Gizi Terapan*. PAU Pangan dan Gizi IPB, Bogor
- Hardinsyah, Dodik B., Retnaningsih, Herawati, Retno W. 2002. *Analisis Kebutuhan Konsumsi Pangan*. Pusat Studi Kebijakan pangan dan Gizi IPB dan Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian
- Hardinsyah, Drajat Martianto. 1989. *Menaksir Kecukupan Energi dan Protein serta Penilaian Mutu Gizi Konsumsi Pangan*. Wirasari, Jakarta.
- Hardinsyah, Yayuk FB, Martianto D., Handewi SR, Agus W., dan Subiyakto. 2001. *Pengembangan Konsumsi Pangan dengan Pendekatan Pola Pangan Harapan*. Pusat Studi Kebijakan Pangan dan gizi IPB, Lembaga Penelitian IPB dan Pusat Pengembangan Ketersediaan pangan Departemen Pertanian
- Harper, I. J. , B. J. Draton & J. A. Driskel. 1988. *Pangan, Gizi dan Pertanian (Suhardjo, penerjemah)*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hikam, AS (2014) *Menyongsong 2014-2019. memeperkuat Indonesia dalam Dunia yang berubah*. Jakarta cv. rumah buku
- Hutabarat, J dan M. Huseini. 2006. *Operasionalisasi Strategi*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Kahraman, Cengiz, Nihan Etin Demirel, Tufan Demirel. 2007. *Prioritization of e-Government Strategies using a SWOT-AHP Analysis: The Case of Turkey. European Journal of Information Systems* 16.3 (Jul 2007): 284-298
- Khomsan, Ali. 2002. *Pangan dan Gizi dalam Dimensi Kesejahteraan*. Jurusan GMSK Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group, Malang.
- Lang.,T dan Barling.,D (2013) *Conference on 'Future food and health'Symposium I: Sustainability and food security*. *Proceedings of the Nutrition Society* (2013), 72, 1–12
- Lubis dan Arianti (2011) *Dampak Liberalisasi WTO TerhadapKetahanan pangan beras dan gula*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2. pp 148-163*
- Lutz.,J dan Schachinger.,J (2013) *Do Local Food Networks Foster Socio-EcologicalTransitions towards Food*

- Sovereignty? Learning from Real Place Experiences. *Sustainability* 5, 4778-4796;
- Maarif, M.S. dan Hendri T. 2003. Teknik-teknik Kuantitatif Untuk Manajemen. PT.Grasindo, Jakarta
- Mahfi, Tabrani. 2009. Analisis Situasi Pangan dan Gizi untuk Perumusan Kebijakan Operasional Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Mahmuri. 2005. Analisis Situasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu. Tesis. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Mahmuri. 2005. Analisis Situasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis IPB
- Marimin dan Maghfiroh, Nurul. 2010. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. IPB Press, Bogor
- Martianto, Drajat dan Ariani. 2004. Analisis Konsumsi Pangan Rumah tangga. Prosiding Widyakarya Nasional pangan dan Gizi VIII. 17-19 Mei 2004. LIPI, Jakarta
- Martianto, Drajat, Yayuk Farida Baliwati, Dahrulsyah, dan Handewi. 2007. Laporan Akhir koordinasi Kebijakan Solusi Sistemik Masalah Ketahanan Pangan dalam Upaya Perumusan Kebijakan Pengembangan Penganekaragaman Pangan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta.
- Pearce II, J.A. dan R.B. Robinson, 2003. *Strategic Management, Formulation, Implementation, and Control. Eight Edition*. Irwin Mc Graw-Hall.
- Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan. 2011. Peraturan Kepala BKP No 006/Kpts/OT.140./K/01/2011.
- Program Ketahanan Pangan Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Pertanian. 2010. Peraturan Menteri Pertanian No 65/Permentan/OT.140/12/2010. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Permadi, B. 1992. AHP. Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Rangkuti, Freddy. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ratan Lal dkk. .2003. Food Security and Environmental Quality in the Developing World.London Lewis Publishers.
- Saeri, M (2011) Teori Hubungan Republik Indonesia. Undang-undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Salvatore.,D (2009) ekonomi manajerial dalam perekonomian global. Jakarta. Airlangga
- Scherb dkk (2012) Exploring food system policy: A survey of food policy councils in the United States. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*. Advance online publication. <http://dx.doi.org/10.5304/jafscd.2012.024.007>
- Stewart.,D dkk (2014) Beyond nutrition and agriculture policy: collaborating for a food policy. *British Journal of Nutrition* (2014), 112, S65–S74
- Rochman, Nurul Taufiq, E. Gumbira Sa'id, Arief Daryanto, Nunung Nuryartono. 2011. *Analysis of Indonesian Agroindustry Competitiveness in Nanotechnology Development Perspective Using SWOT-AHP Method. International Journal of Business and Management* 6.8 (Aug 2011): 235-244
- Saaty, Thomas L. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta

- Singarimbun, Masri. 1983. *Metode Penelitian Survei*. CV Rasma Agung, Jakarta.
- Sukari. 2009. *Strategi Pengembangan Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis IPB
- Suryadi, Kadarsah dan Ali Ramdhani. 1998. *Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Umar, Husein. 2008. *Strategic Management in Action*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wheelen, Thomas L dan J. David Hunger. 2010. *Strategic Management and Business Policy Twelfth Edition*. Prentice Hall, New Jersey.
- Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII. 2004. *Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi*. LIPI, Jakarta.
- Vaitkeviciute R., dkk (2014) The relationship between food literacy and dietary intake in adolescents: a systematic review. *Public Health Nutrition*: 18(4), 649–658